

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Laju inflasi di Kabupaten Tana Toraja pada triwulan I 2026 secara umum terkendali namun tetap mewaspadai lonjakan Indeks Perubahan Harga (IPH). Laju inflasi daerah ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi komoditas strategis nasional.

Januari 2026: Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar 4,11% (year-on-year)

Februari 2026: Inflasi tahunan Sulawesi Selatan melonjak ke angka 6,13%

Maret 2026: Inflasi tahunan Sulawesi Selatan mengalami penurunan dan melandai di angka 4,5%

Berdasarkan hasil inspeksi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan pada Maret 2026 di beberapa lokasi seperti Pasar Sentral Makale, Pasar Rantetayo, dan Pasar Ge'tengan, berikut adalah rincian kisaran harga komoditas utama yang tercatat: Beras Premium: Rp15.000 per kg, Beras Medium: Rp13.000 per kg, Gula Pasir: Rp18.000 - Rp20.000 per kg, LPG 3 Kg (Tingkat Pangkalan): Rp22.500 (Harga Eceran Tertinggi). Bahan Pokok Lainnya (Minyak Goreng, Tepung, Telur, dan Bumbu Dapur): Relatif stabil dengan fluktuasi wajar sesuai batas normal pasokan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan utama pengendalian inflasi di Kabupaten Tana Toraja pada triwulan 1 2026 berpusat pada fluktuasi harga komoditas pangan strategis (terutama cabai rawit, beras, dan daging ayam) serta tekanan permintaan musiman jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri.

Detail spesifik permasalahan dan tantangan tersebut mencakup: Fluktuasi Harga :

1. Komoditas Pangan: Komoditas seperti cabai rawit sempat menjadi penyumbang kenaikan inflasi tertinggi, bersamaan dengan beras dan daging ayam ras, yang memicu Indeks Perubahan Harga (IPH) mencapai 0,83 pada periode pengawasan Februari 2026.
2. Distribusi dan Distribusi Gas Bersubsidi: Terdapat kendala terkait distribusi dan kelangkaan LPG 3 Kg di wilayah tetangga (seperti Toraja Utara), yang memicu lonjakan harga enceran secara lokal dan memerlukan pengawasan ketat agar tidak merembet ke Tana Toraja.
3. Potensi Hambatan Distribusi Regional: Kondisi geografis dan kelancaran pasokan dari daerah produsen di Sulawesi Selatan mempengaruhi kestabilan stok harian di pasar tradisional seperti Pasar Ge'tengan dan Pasar Rantetayo.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai respons, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tana Toraja telah melakukan berbagai langkah mitigasi, termasuk:

1. Menerbitkan SK Bupati tentang Pembentukan TPID Tana Toraja Tahun 2026 untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan antardaerah.
 2. Melakukan inspeksi mendadak (sidak) pasar dan memantau ketersediaan stok cadangan beras di Gudang Bulog pada awal Maret 2026.
 3. Menjaga harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 Kg dan BBM bersubsidi agar tetap sesuai ketentuan di tingkat pangkalan dan SPBU.
 4. Mengikuti rapat koordinasi (Rakor) secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri dan High Level Meeting (HLM) TPID Sulsel.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi utama pengendalian inflasi daerah triwulan 1 berfokus pada langkah antisipatif lonjakan harga komoditas pangan (volatile food) menjelang hari besar keagamaan nasional, optimalisasi neraca pangan, serta penguatan digitalisasi sistem peringatan dini (early warning system) TPID guna menjaga inflasi dalam rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$

Rencana aksi strategis yang direkomendasikan untuk diterapkan di daerah meliputi: Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM):

1. Melaksanakan operasi pasar secara masif dan berkala, khususnya untuk komoditas penyumbang inflasi utama seperti beras, cabai, bawang, dan daging. Optimalisasi Distribusi dan Logistik Pangan:
2. Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD): Menjalin kesepakatan dagang dengan kabupaten/kota atau provinsi surplus penghasil pangan untuk menjamin ketersediaan stok.
3. Pemanfaatan Sistem Peringatan Dini Digital: Menerapkan platform pemantauan harga dan ketersediaan pasokan secara real-time seperti yang dicontohkan oleh Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).
4. Pemberian Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran: Melanjutkan penyaluran program bantuan pangan (misalnya bantuan beras dan minyak goreng) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menjaga daya beli masyarakat. Inspeksi Pasar dan Pencegahan Penimbunan:
5. Meningkatkan koordinasi dengan Satgas Pangan dan aparat penegak hukum untuk menindak praktik spekulasi atau penimbunan barang pokok